Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Sedikitnya Butuh Rp 5,8 Triliun

Anggota Dewan Hitung Kebutuhan Anggaran jika Ibu Kota Lockdown

JAKARTA-Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiyono menawarkan delapan alternatif skema biaya penyaluran bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Skema biaya tersebut digunakan apabila Jakarta diputuskan untuk lockdown atau karantina wilayah selama 14 hari akibat penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Berdasarkan kajian Demokrat, Jakarta dapat menyiapkan dana sekitar Rp5,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terus meluas. Saya yakin Jakarta siap, apalagi APBD DKI Jakarta mencapai Rp87,95 triliun," kata Mujiyono di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

"Saya rasa ini relevan karena pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat juga, apalagi di tengah pandemi Corona seperti ini," kata Mujiyono yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut. Dia mengatakan bahwa delapan skema pembiayaan yang telah dikaji sangat matang.

Skema pembiayaan pertama adalah menyalurkan beras sebanyak 0,5 liter seharga Rp6.000 kepada 11.058.949 warga DKI Jakarta selama 14 hari. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli beras sekitar Rp928 miliar lebih. Skema kedua, membeli kebutuhan lauk kalengan, telur ayam, minyak dan sebagainya untuk 11 juta jiwa tersebut masing-masing biaya Rp25.000.

Apabila dilakukan selama 14 hari, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp3,8 triliun lebih. Skema ketiga kebutuhan alat kebersihan diri seperti sabun dan disinfektan untuk warga Jakarta sebesar Rp50.000 per orang. Biaya dikeluarkan mencapai Rp552 miliar lebih. Skema keempat, kebutuhan susu balita atau MPASI (makanan pendamping ASI) kepada 817.828 balita dengan masing-masing harganya Rp200.000. Anggaran dibutuhkan Rp163 miliar.

Selanjutnya, skema pembiayaan kelima pemerintah daerah membeli kebutuhan makanan tambahan atau suplemen untuk 928.165 orang lanjut usia (lansia) dengan masing-masing biaya Rp100.000. Anggaran dibutuhkan untuk kebutuhan mereka adalah Rp928 juta. Berikutnya, skema pembiayaan keenam pemerintah memberikan kebutuhan spesifik untuk 5.793 orang penyandang disabilitas, biaya Rp100.000 per orang. Pagu yang dibutuhkan untuk mereka sekitar Rp573 juta lebih.

Untuk skema ketujuh pemerintah menyiapkan kebutuhan air minum untuk 11 juta lebih warganya dengan masing-masing Rp1.000 per orang selama 14 hari. Biaya diperlukan adalah Rp154 miliar. "Terakhir skema kedelapan, pemerintah menyiapkan biaya distribusi memakai perangkat RT/RW/Polisi/TNI untuk 11 juta lebih warganya masing-masing Rp1.000 per orang selama 14 hari," ungkapnya.

Biaya yang diperlukan adalah Rp154 miliar."Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp5,8 triliun. Angka ini lebih hemat dibanding, memakai jasa ojek online dalam skema pendistribusiannya dengan prediksi total menembus Rp8,4 triliun," ucapnya.

Respon Positif

Rencana Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan karantina wilayah mendapat respon positif dari sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta. Salah satunya adalah Fraksi NasDem. Fraksi yang mempunyai tujuh kursi di DPRD DKI Jakarta itu mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan karantina wilayah tersebut.

Namun keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Jakarta."NasDem akan mendukung semua kebijakan Pemprov DKI dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 ini. Termasuk ketika harus melakukan karantina wilayah. Tapi sebelum kebijakan ini diberlakukan harus ada dulu kesepahaman kerja antara pemerintah pusat," ujar Ketua Fraksi NasDem DKI Wibi Andrino.

Dikatakan, kenapa pihaknya selalu menekankan, kalau setiap penanganan Covid-19 Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hal itu tidak lain agar setiap keputusan yang dikeluarkan bulat. Bukan keputusan masing-masing. Sehingga tidak terjadi lempar kesalahan atau tanggung jawab.

Wibi mengatakan saat ini Jakarta telah menjadi pusat penyebaran Corona di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba."Kekhawatiran kami, jika Jakarta tidak dikarantina, maka penduduk pendatang yang nanti pulang kampung akan membawa wabah ini ke kampung masing-masing. Ini bisa jadi problem yang sangat serius,"terangnya.

Namun demikian ketiaka, kanrantina wikayah ini diberlakukan, pihaknya meminta, Anies bisa menjamin ketersediaan pangan serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung."Jadi Jakarta harus siap semuanya. Masalah pangan, masalah fasilitas kesehatan, hak dasar kesehatan rakyat Jakarta pokonya semuanya harus terpenuhi,"pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya masih mengkaji dan membahas berbagai opsi dalam menangani, mengendalikan dan mencegah penularan virus Corona atau Covid-19 di DKI Jakarta. Termasuk, kata Anies, pihaknya sedang mengkaji opsi melakukan karantina wilayah atau lockdown Jakarta.

PAD Anjlok

Efek lanjutan dari pandemi virus Corona adalah menurunnya kegiatan ekonomi. Khusus untuk Jakarta yang merupakan wilayah paling terpapar, dampak ekonominya akan segera dirasakan. Untuk itu, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengusulkan ada penyesuaian dalam APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. "Yang sudah pasti berkurang adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan pungutan," ujar Dedi Supriadi, Sabtu (28/3/2020).

Beberapa jenis pajak yang pasti akan berkurang menurut Dedi adalah pajak restoran, hiburan, hotel dan BPHTB. Hal tersebut sudah terlihat dengan kebijakan pembatasan pergerakan warga, penutupan tempat hiburan, dibatalkannya beberapa event besar dan menurunnya tingkat hunian serta pemasukan restoran dalam situasi tanggap darurat bencana Covid-19.

Sebelumnya Pemprov dan DPRD DKI merancang penerimaan dari berbagai sektor tersebut, sebagai berikut: Pajak Hotel Rp1,95 T, Restoran Rp4,25 T, Hiburan Rp1,1 T dan BPHTB Rp10,6 T. Pendapatan dari sektor tersebut terancam hangus dibakar Corona.

Sementara di sisi lain, makin banyak warga yang terdampak secara ekonomi dalam kondisi seperti ini. "Kebijakan agar warga stay at home, belajar, bekerja dan beribadah dari rumah ibarat obat sangat pahit yang mesti diminum jika kita mau sembuh. Nah, kita mesti mengakali rasa pahit itu agar tidak terlalu membawa masalah lain," tutur Dedi mengibaratkan kondisi saat ini.

Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini mengusulkan beberapa pos anggaran digeser. "Anggaran untuk kegiatan atau event, beberapa infrastuktur dan perjalanan dinas yang bisa ditunda, bisa menjadi alternatif dialihkan untuk biaya menghadapi wabah Covid-19," katanya.

Selain itu, Dedi juga meminta Pemprov agar belanja APBD diarahkan pada pos anggaran yang dapat menggerakkan perekonomian di tingkat terbawah. "Program social safety net mesti sangat terencana dan tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat dan pihak swasta yang ingin membantu," tutur Dedi mengakhiri usulannya.

Cairkan Dulu

Partai Gerindra kembali mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperhatikan terlebih dahulu nasib rakyat kecil sebelum mengeluarkan kebijakan lockdown. Pasalnya, partai pendukung Anies saat Pilkada Jakarta ini, menilai rakyat kecil yang akan berdampak langsung ketika kebijakan lockdown dikeluarkan.

"Menurut saya cairkan dulu bantuan langsung buat rakyat kecil, setelah itu baru ngomong lockdown atau karantina wilayah,"ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M Taufik kepada MONITOR melalui sambungan telpon, Minggu, (29/3).

Menurut Taufik, untuk mencairkan bantuan langsung kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang berpenghasilan dari bekerja harian, bagi Pemprov DKI bukanlah hal yang sulit. Caranya dengan merelokasi anggaran-anggaran perjalanan dinas yang aktifitas telah berkurang drastis. Ditambah mengalihkan semua anggaran kegiatan yang bukan prioritas. **(dni)**

> "Terakhir skema kedelapan, pemerintah menyiapkan biaya distribusi memakai perangkat RT/RW/Polisi/TNI untuk 11 juta lebih warganya masing-masing Rp1.000 per orang selama 14 hari."
>
> ***Mujiyono***
> *Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat*